

**OPTIMALISASI E-ORDER PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK
PEMBERDAYAAN UMKM PADA SUKU DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DI KOTA JAKARTA PUSAT**

AISYAH HAFIRA RIZAL

NPP. 30.0515

Asdaf Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 30.0515@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *E-Order is an innovation to market the products of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) traders to make it easier for sellers to promote and sell items to buyer. Online orders or E-Orders are requests from buyers to sellers for goods or services sold by sellers through online orders. Processing customer orders starting from receiving customer orders, completing sales orders, checking the availability of items in the warehouse, determining the route and delivery date until the goods are received by the customer. Purpose:* The purpose of this study is to find out and analyze how UMKM Empowerment by the Central Jakarta Administration City Fire and Rescue Service in the procurement of goods and services through the development of E-Orders. **Method:** The Author used a qualitative descriptive research method in this study because the author wants to describe the empowerment of micro, small and medium enterprises through e-orders by The Central Jakarta Administration City Fire and Rescue Service in the Procurement of Government Goods and Services. **Result:** Creating an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop optimally, reinforcement that is able to strengthen the knowledge and abilities possessed by the community in solving problems and meeting needs, as well as protecting the community, especially weak groups so that they are not oppressed by strong groups and weak groups as well as preventing unequal competition between the exploitation of strong groups against weak groups. Supporting factors for the development of e-orders include monitoring and evaluation carried out by the DKI Jakarta Province BPPBJ e-order team, the person in charge/guidance for MSME actors registered in the e-order application and providing higher quality products and ordering/transaction processes through the e-application. e-orders that are real time and are recorded directly in the application in the order history. **Conclusion:** Optimizing Efforts to Empower the E-Order system for the procurement of goods and services at the Fire and Rescue Agency for empowering MSMEs in Central Jakarta City, an atmosphere or climate (empowering) has been created that allows the potential of the community to be able to develop and compete optimally in the Implementation of E-orders for MSMEs in government procurement of goods and services.

Keywords: *E-Order, UKM, Fire Service*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): E-Order merupakan inovasi guna memberdayakan para pelaku UMKM untuk mempermudah menjual barang sampai ke pembeli. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu SKPD yang menggunakan sistem e-order dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. SKPD ini telah menggunakan sistem e-order sejak tahun 2019 dan dalam pengoprasiaannya SKPD ini tidaklah dapat dilaksanakan secara online, meski pada saat pandemi Covid-19 serta SKPD ini memiliki pegawai yang tergolong banyak, maka dari itu tentunya index dan frekuensi pemesanan sistem e-order banyak dimanfaatkan oleh SKPD tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pemberdayaan UMKM oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pengadaan barang dan jasa melalui pengembangan E-Order. **Metode:** Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan optimalisasi e-order Pengadaan Barang dan Jasa pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat. Dengan adanya tujuan, maka akan memungkinkan terciptanya potensi masyarakat berkembang secara optimal, alternatif keputusan yang dapat memberikan pilihan aktivitas untuk dapat mencapai tujuan yaitu optimalisasi e-order pengadaan barang dan jasa pada Suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota administrasi Jakarta Pusat. Adanya Sumber daya yang membatasi mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan e-order dalam pengadaan barang dan jasa yang dioprasikan oleh SKPD tersebut hingga kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal. Penulisan ini berguna untuk mengoptimalkan pengoprasian E-Order dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memperbaiki system dan membuat kebijakan terkait e-order. Penelitian ini juga berguna bagi pejabat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa di satkernya. **Kesimpulan:** Pengoptimalan Upaya Pemberdayaan sistem E-Order pengadaan barang dan jasa pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk pemberdayaan UMKM di Kota Jakarta pusat sudah terciptanya suasana atau iklim (empowering) yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing secara optimal dalam Pelaksanaan E-order bagi UMKM pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kata Kunci: Optimalisasi, E-Order, UMKM, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di zaman globalisasi ini, masyarakat modern sudah banyak memanfaatkan internet untuk menopang kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah dengan melakukan transaksi pembelian secara online menggunakan online order atau yang sering disingkat dengan E-Order. E-Order adalah suatu layanan dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan seorang konsumen dalam hal pemesanan suatu barang atau layanan jasa. E-Order adalah inovasi guna memasarkan produk pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memudahkan penjual mempromosikan dan menjual barang hingga sampai ke pembeli. E-order pertama kali digelar pada tanggal 19-26 Juni 2019 tersebut diberikan kepada Kasatpel PKT dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan di tujuh SKPD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Kepulauan Seribu. Ketujuh SKPD tersebut adalah Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Dan pada tahun 2022 Keseluruhan SKPD di DKI Jakarta telah menggunakan aplikasi sistem E-Order untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu SKPD/UKPD yang telah mengoprasionalisasikan penggunaan sistem E-Order dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat ini memiliki total 738 tenaga pegawai yang pelayanan oprasionalnya tidak dapat berjalan secara online meski saat pandemi covid-19, maka dari itu tentunya penggunaan sistem E-Order untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang digunakan oleh SKPD ini tergolong tinggi/banyak. Pesan Online atau E-Order adalah permintaan dari pembeli kepada penjual atas barang atau jasa yang di jual oleh penjual lewat media sosial atau online. Pemrosesan pesanan pelanggan mulai dari penerimaan pesanan pelanggan, melengkapi surat order penjualan, mengecek ketersediaan barang di gudang, menentukan rute dan tanggal pengiriman sampai dengan barang di terima oleh pelanggan. Selain itu Abdul Gani (2020) mengatakan bahwa “E-Order merupakan hasil kolaborasi Pemprov DKI dengan pedagang UMKM untuk saling membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di ibukota, dan juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku usaha pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). E-order sangat berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pihak bisnis dari sebuah perusahaan dalam hal utilisasi teknologi untuk membantu, mengoptimalisasi jalannya satu atau lebih proses bisnis.” Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM di Indonesia berkontribusi signifikan ketika krisis yang dialami pada periode 1998 sampai dengan 2000. UMKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UKM (www.depkop.go.id diakses pada 18 September 2022). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu. Salah satu kegiatan dari UMKM adalah kegiatan pengadaan barang di sebuah instansi. Berdasarkan data yang peneliti peroleh sebanyak 3.720 perusahaan yang telah menggunakan E-Order dan sebanyak 15.147 UMKM yang terdaftar dalam E-Order perioden 2020-2022 (www.eorder.go.id). Barat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Jakarta pusat merupakan salah satu wilayah yang telah menerapkan E-Order dalam pelaksanaan operasionalnya. Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui website www.bppbj.jakarta.co.id menyatakan bahwa sebanyak 2.884 UMKM Jakarta Pusat telah terdaftar dalam pelaksanaan E-Order, kemudian sebanyak 11.972 produk yang terdaftar dalam

E-Order, sebanyak 644 SKPD/BUMD aktif bertransaksi dimana total transaksi mencapai Rp69.187.974.976 pada tahun 2022. Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan E-Order adalah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat beralamat di Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan juga penyelamatan. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat berorientasi pada pelayanan publik dan dibentuknya Dinas ini merupakan perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan perlindungan kepada warganya dari ancaman kebakaran dan lainnya, maka dari itu dibutuhkannya penyelenggaraan pengelolaan pencegahan kebakaran dan penyelamatan, penanggulangan kebakaran dan bencana yang efektif, efisien, terarah, dan modern serta memaksimalkan pemberdayaan masyarakat yang ada dalam mewujudkan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada warga kota. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Propinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran. Dibentuknya organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ini merupakan perwujudan tanggung jawab Pemda DKI dalam rangka memberikan perlindungan kepada warganya dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Untuk melaksanakan tugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai fungsi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas, Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas, penyusunan peta rawan kebakaran dan bencana di wilayahnya, pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan wilayahnya dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana, pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan lingkungan hunian terhadap bahaya kebakaran dan bencana, pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, termasuk komando operasional pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana, pelaksanaan pendataan, penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran, bekerjasama dengan instansi terkait, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, pembinaan ketrampilan petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan dan pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan konsultasi teknis pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana terhadap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah, swasta atau masyarakat pada lingkup Kota Administrasi. Akan tetapi masih terdapat permasalahan dalam menerapkan pengadaan barang di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dimana pelaksanaan E-Order mereka masih belum optimal sehingga sangat penting dilakukan peningkatan guna memperlancar kegiatan UMKM terhadap pengadaan barang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam Pemberdayaan UMKM. Penelitian Eka Septian (2022) berjudul *Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada Bela Pengadaan dan Simpel Kemdikbudristek dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional*, menemukan bahwa Afirmasi peran pemerintah dalam memberikan peluang lebih besar kepada produk lokal dan UMK dengan mengalokasi lebih banyak paket pengadaan, sebanyak 37.113 paket untuk belanja di lingkungan Kemdikbudristek atau dengan nilai pagu Rp

7.844.209.829.149 menjadi potensi partisipasi dari UMK. Partisipasi UMK pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kemdikbudristek melalui Bela Pengadaan dan Simpel ditengah kondisi daya beli masyarakat yang turun, adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional indonesia. Penelitian Alif, Salsabila & Katya, (2012) berjudul Pemerintahan Kolaboratif Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Jakpreneur menemukan bahwa proses kolaborasi berlangsung secara efektif antar stakeholder terkait. Kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini direpresentasikan melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan dari tahapan P1-P7 Program Jakpreneur. Penelitian Rendiyatna Ferdian (2021) berjudul Pengelolaan Pengadaan Dan Persediaan Barang Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kelurahan Margasari Bandung menemukan bahwa Pemerintah Kota Bandung menilai UMKM merupakan sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi ini. Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM pada kondisi pandemi ini diantaranya adalah harga bahan baku yang meningkat yang mengakibatkan pengelolaan pengadaan dan persediaan barang menjadi terhambat. Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kami coba untuk membantu pelaku UMKM khususnya di bidang makanan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung untuk mengelola pengadaan dan persediaan barang guna menghadapi kondisi pandemi dan new norma Covid 19 ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pemberdayaan UMKM Pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kota Jakarta Pusat. Perbedaannya terletak pada pokok bahasannya, lokasi penelitian dilakukan dan metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian tersebut.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pemberdayaan UMKM oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pengadaan barang dan jasa melalui pengembangan E-Order.

II. METODE

Notoatmojo (2012), mengatakan “penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan dilakukan terhadap sekumpulan obyek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu dan bertujuan membuat penilaian terhadap suatu kondisi dan penyelenggaraan suatu program di masa mendatang”.

“Instrumen penelitian adalah merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.” pernyataan tersebut merupakan pengertian instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006).

Menurut Nazir (2013: 166), mengatakan “pendekatan induktif merupakan cara berfikir untuk memberikan alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum”. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang harus diperoleh haruslah mendalam,

jelas dan spesifik. (Sugiyono, 2008) bahwa secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut menurut (Sugiyono, 2008) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto- foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis Optimalisasi E-Order Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Pemberdayaan Umkm Pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kota Jakarta Pusat menggunakan teori Upaya Pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996) dimana pada teori ini dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu Enabling (Mengaktifkan), Empowering (Pemberdayaan), Protecting (Perlindungan), adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Enabling (Mengaktifkan)

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan mengaktifkan potensi masyarakat untuk berkembang (Enabling) merupakan dimensi pertama dalam Upaya Pemberdayaan. Dimensi tersebut diukur oleh penulis dengan 1 (Satu) indikator, yaitu Sosialisasi pengenalan sistem E-Order kepada pelaku UMKM, yang diukur dari indikator berikut:

1. Pelatihan Sosialisasi Pengenalan Sistem E-Order kepada Pelaku UMKM

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi mekanisme sistem aplikasi E-Order kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pembina atau Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Tahap pertama sosialisasi sistem E-Order ini dilaksanakan pada tanggal 16-17 Mei 2019 yang di ikuti oleh pembina UMKM, lalu sosialisasi pendaftaran UMKM ke E-Order untuk Satpel, PNS, PKT dan PJLP Pendamping kewirausahaan pada tanggal 19-26 Juni 2019. Dan pada tanggal 19 Juli BPPBJ DKI resmi launching ke Pelaku UMKM untuk memasarkan produk barang/jasa di aplikasi sistem E-Order. Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa Sosialisasi pengenalan sistem E-Order kepada para pelaku UMKM telah berjalan dengan baik serta mendapatkan respon yang baik dari para pelaku UMKM yang hadir sebagai peserta UMKM dalam sosialisasi E-Order. Sosialisasi Pengenalan Sistem E-Order kepada para pelaku UMKM sukses menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yang menciptakan situasi yang membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.

3.2. Empowering (Pemberdayaan)

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (Empowering) merupakan dimensi ke dua dalam teori Upaya Pemberdayaan. Dimensi yang di ukur oleh penulis dengan dua indikator yaitu Memperkuat Potensi dan Daya yang dimiliki masyarakat dan Pembukaan Peluang (opportunities) kepada para pelaku UMKM, yang diukur dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Memperkuat Potensi dan Daya yang dimiliki Masyarakat

Cara memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (Empowering) adalah dengan mendorong dan memperbolehkan seseorang untuk mengambil tanggung jawab secara pribadi untuk meningkatkan atau memperbaiki suatu masalah sehingga dapat meningkatkan kontribusi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis para pelaku UMKM yang menggunakan sistem aplikasi E-Order sekarang

ini banyak menampilkan kreativitas-kreativitas dalam pemasaran produknya yang dapat di lihat pada E-Katalog yang berada di dalam aplikasi sistem E-Order.

2. Pembukaan peluang (opportunities) Kepada Pelaku UMKM

Indikator berikutnya yang penulis gunakan untuk mengukur keberhasilan Pemberdayaan UMKM melalui E-Order oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dilihat dari adanya berbagai akses sebagai peluang untuk membuat para pelaku UMKM melalui sistem E-Order lebih berdaya. Akses yang dimaksud dalam pembukaan peluang (opportunities) yang dapat diberikan adalah dengan adanya Implementasi kebijakan E-Order pada Transaksi Pengadaan Langsung dengan UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020, yang digantikan dengan Instruksi Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan UMKM melalui sistem E-Order. Dengan Adanya Kebijakan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan peluang kepada para pelaku UMKMm karna kebutuhan akan barang dan jasa yang selalu dipastikan setiap tahunnya akan terjadi di setiap OPD, dimana setiap tahun anggaran yang baru akan selalu diadakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Salah satu keberhasilan dan kesuksesan dalam menciptakan peluang pemberdayaan UMKM melalui E-Order adalah dengan Peraihan penghargaan yang berhasil didapati oleh Pemprov DKI Jakarta dalam ajang Indonesia Government Procurement Award 2020 dalam kategori Inovasi Pengadaan yang mendukung Transparansi Belanja pengadaan, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

3.3. Protecting (Melindungi)

Pemberdayaan mengandung arti melindungi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan pemberdayaan yang tidak seimbang dan tidak sehat. Protecting merupakan usaha melindungi masyarakat utamanya melindungi kelompok-kelompok kecil agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok yang lebih kuat. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas, dan masyarakat terasing. Dimensi ini penulis gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan UMKM melalui sistem E-Order oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang diukur dari indikator berikut:

1. Mencegah Terjadinya Persaingan Yang tidak Seimbang

Mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang merupakan salah satu indikator yang penulis gunakan untuk mengukur sejauh mana pemberdayaan UMKM melalui E-Order berjalan, memberdayakan mengandung arti melindungi (protecting). Upaya pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM melalui sistem E-Order dapat dilakukan dengan 3 (tiga) upaya, yakni memberikan akses kesetaraan terhadap sumber daya, pelayanan dan juga partisipasi masyarakat. Dalam sistem E-Order, semua pelaku UMKM memiliki kesetaraan yang sama dalam mempromosikan dan menjual produk-produk yang bisa di daftarkan pada E-Order yaitu, produk makanan minuman, jasa katering, souvenir, kesehatan, kesenian dan lainnya. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah terpinggirkan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengoptimalan Upaya Pemberdayaan sistem E-Order pengadaan barang dan jasa pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk pemberdayaan UMKM di Kota Jakarta pusat sudah tercipta suasana atau iklim (empowering) yang memungkinkan potensi

masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing secara optimal dalam Pelaksanaan E-order bagi UMKM pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Banyaknya Pembukaan peluang (opportunities) kepada pelaku Pemberdayaan UMKM melalui sistem E-Order yang membantu memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, Perlindungan (protecting) yang di dapatkan oleh pelaku UMKM melalui sistem E-Order telah berjalan dengan baik karena sistem yang ada pada aplikasi E-Order atau Online Order telah melindungi para pelaku UMKM terutama kelompok-kelompok lemah dan tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, serta tidak terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara kelompok kuat terhadap kelompok lemah karena dalam sistem E-order penjual dan pembeli tidak bertemu langsung sehingga menghindari adanya nepotisme, dan kecurangan lainnya serta dalam penyusunan katalog e-order tidak berdasarkan popularitas atau banyaknya kuantitas pembelian sehingga dalam memilih produk yang ditawarkan pada E-Order kepada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dipilih secara adil dan sesuai dengan anggaran serta kebutuhan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor penghambat pada saat melakukan pengembangan E-Order seperti seringkali terjadi ketidakstabilan jaringan internet terhadap server aplikasi E-Order, yang mengakibatkan server sering down, belum adanya sinkronisasi aplikasi E-Order dengan system keuangan/pembayaran yang ada di Pemprov DKI, sehingga butuh proses cukup panjang untuk proses pembayaran, masih membutuhkan banyak dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dalam proses realisasi melalui aplikasi e-order, belum adanya template berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan hasil pengadaan barang/jasa melalui aplikasi E-Order dan lambannya response dari penyedia/UMKM e-order menanggapi pesanan yang dilakukan melalui sistem tersebut.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Pengoptimalan Upaya Pemberdayaan sistem E-Order pengadaan barang dan jasa pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk pemberdayaan UMKM di Kota Jakarta pusat sudah tercipta suasana atau iklim (empowering) yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing secara optimal dalam Pelaksanaan E-order bagi UMKM pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Banyaknya Pembukaan peluang (opportunities) kepada pelaku Pemberdayaan UMKM melalui sistem E-Order yang membantu memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, Perlindungan (protecting) yang di dapatkan oleh pelaku UMKM melalui sistem E-Order telah berjalan dengan baik karena sistem yang ada pada aplikasi E-Order atau Online Order telah melindungi para pelaku UMKM terutama kelompok-kelompok lemah dan tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, serta tidak terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara kelompok kuat terhadap kelompok lemah karena dalam sistem E-order penjual dan pembeli tidak bertemu langsung sehingga menghindari adanya nepotisme, dan kecurangan lainnya serta dalam penyusunan katalog e-order tidak berdasarkan popularitas atau banyaknya kuantitas pembelian sehingga dalam memilih produk yang ditawarkan pada E-Order kepada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dipilih secara adil dan sesuai dengan anggaran serta kebutuhan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja yaitu Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai model studi kasus yang dipilih teori Upaya Pemberdayaan menurut Kartasmita (1996).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan UMKM untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nyoman, Sumaryadi (2016). *Reformasi Birokrasi Pemerintahan*. Bogor Ghalia Indonesia
- Sugiyono (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Nursalam.
- Nazir. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Rendiyatna, Ferdian, (2021). *Pengelolaan Pengadaan Dan Persediaan Barang Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kelurahan Margasari Bandung*
- Alif, Salsabila & Katya, (2012). *Pemerintahan Kolaboratif Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Jakpreneur*
- Eka, Septian, (2022) *Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada Bela Pengadaan dan Simpel Kemdikbudristek dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional*